

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN
PERLENGKAPANNYA (UTTP) OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PASAR PAGI
ARENGKA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

MUHAMMAD FIKRI

NPM : 157110014

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Muhammad Fikri
NPM : 157110014
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : S1 (S1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Ukuran, Takaran, timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing badan sub-sub dalam usulan penelitian ini, telah di pelajari dan di nilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat di setujui untuk di seminarkan.

Pekanbaru, 18 Januari 2022

Turut Menyetujui
Program Ilmu Administrasi Publik
Ketua

Pembimbing I

Lilis Suriyani, S.Sos.,M.Si

Dr. H. A Tarmizi Yussa, M.A

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Fikri
 Npm : 157110014
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 18 Januari 2022

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Anggota

Herman, S.Sos., M.Si

Mengetui,
Wakil Dekan I,

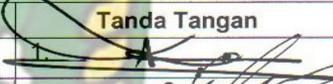
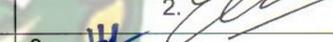
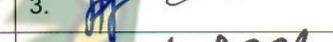
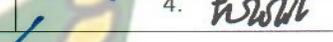
Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1245/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 30 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 31 Agustus 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Muhammad Fikri
NPM : 157110014
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)
Nilai Ujian : Angka : "80" ; Huruf : "B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Ketua	
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Herman, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Loliita Vianda, S.Sos, M.Pd	Notulen	4. 

Pekanbaru, 31 Agustus 2021
 An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fikri
 Npm : 157110014
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaa Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 18 Januari 2022

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Dr. H. A. Tarmizi Yussa, Ma

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian usulan penelitian ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru” (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)**.Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran. Sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Disamping itu penulis menyadari bahwa tanpa bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang turut membantu. Maka sepatutnya penulis menyampaikan dan mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.M., M.C.I selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Ibu Lilis Suriyani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan serta ilmu pengetahuan sehingga penulis sangat terbantu dalam penyelesaian usulan penelitian.
4. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, nasehat dan saran kepada penulis serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan penelitian ini serta telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Kepada para Dosen-dosen dan staf pengajar khususnya Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak/Ibu Tata Usaha yang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
7. Terkhususnya untuk kedua orang tua saya Ayahanda Abdul Rahim dan Ibunda Dewi Marlina, dan segenap keluarga besar yang tak pernah lelah untuk memberikan doa dan motivasi, serta pengorbanan yang tulus dan kasih sayang yang tiada hentinya

8. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2015, terima kasih atas warna-warni yang diberikan masa kuliah serta dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Teman-Teman Kelas AP B Novri wirawan, M. Suhaimi, Hasan Fahri Handoko, Ria Agrinata Jaziad, Anang Sanubari, Asep Rahmat Hidayat dan banyak lagi yang penulis tidak bisa sebutkan semuanya yang selalu membuat hari-hari Perkuliahan menjadi menyenangkan .
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pegawai Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru yang telah bersedia melayani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini yang mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Maka untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap para pembacanya Amin.

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Penulis

Muhammad Fikri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik.....	14
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik.....	16
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik.....	19
4. Konsep Pelayanan Publik.....	22
5. Konsep Pengawasan.....	25
6. Konsep Timbangan.....	32
B. Kerangka Pikir.....	33
C. Konsep Operasional.....	34
D. Operasional Variabel.....	39
E. Teknik Pengukuran.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi Sampel.....	47
D. Teknik Penarikan Sampel	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	53
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	54
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	54
B. Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	55
C. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	56
D. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru....	57
E. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	76
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Identitas Responden	77
1. Jenis Kelamin.....	77
2. Umur Responden	79
3. Pendidikan Responden.....	80
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	82
1. Penetapan standar pelaksanaan	82
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	84
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.....	85
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar	87
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu	88
C. Hambatan dalam Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)	91
BAB VI PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	94

LAMPIRAN.....9

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jenis Dagangan, Jenis Timbangan dan Jumlah Pedagang Pada Pasar Pagi Arengka.....	10
II.1 : Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru (Studi Mengawasi Alat UTTP Pedagang Sembako Pasar Pagi Arengka).....	39
III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....	48
III.2 : Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....	53
IV.1 Distribusi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	76
V.1 Identitas Responden Pegawai Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian	

dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....

 77

V.2 Identitas Responden Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin dalam penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....

 78

V.3 Identitas Responden Masyarakat/Konsumen Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....

 78

V.4 Identitas Responden Pegawai Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....

 80

V.5 Identitas Responden Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....

 79

- V.6 Identitas Responden Masyarakat/Konsumen Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....
.....
79
- V.7 Identitas Responden pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....
.....
80
- V.8 Identitas Responden Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....
.....
81
- V.9 Identitas Responden Masyarakat/Konsumen Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....
.....
81
- V.10 Distribusi Tangapan Responden Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....
.....

	83
V.11	Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan kegiatan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....	84
V.12	Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....	86
V.13	Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar terhadap Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....	87
V.14	Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu terhadap Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....	89

V.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Perindikator Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).....

90



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : pengawasan	Tipe-tipe
29	
II.2 : Kerangka pikir pelaksanaan pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan pekanbaru (Studi mengawasi Alat UTTP Pedagang Sembako Pada Pasar Pagi Arengka)	
34	
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	
56	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner untuk responden pegawai	96
2. Daftar kuisisioner untuk pedagang pasar pagi arengka	106
3. Daftar Kuisisioner untuk masyarakat.....	116
4. Daftar Wawancara Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	126
5. Data Telly Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, Dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)	130
6. Foto Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)	137
7. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir Nomor 1198/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang: PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA Tanggal 22 Desember 2018 Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, perihal penetapan Dosen Pembimbing an. Muhammad Fikri	

.....
142

- 8. Surat Rekomendasi Riset No. 1391/E-UIR/27-FS/2021 Tanggal 30 Maret 2021 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau an. Muhammad Fikri

.....
143

- 9. Surat Rekomendasi No. 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40523 Tanggal 6 April 2021 Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau, Perihal izin Penelitian an. Muhammad Fikri

.....
144

- 10. Surat Rekomendasi No. 071/BKBP-SKP/1215/2021 Tanggal 8 April 2021 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru, Perihal Rekomendasi Riset an, Muhammad Fikri

.....
145

- 11. Surat Keterangan No : 071/DPP/-1/247 Tanggal 19 Mei 2021 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Perihal Penelitian dan Pengumpulan data an. Muhammad Fikri

.....
146

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif / Skripsi yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri
 NPM : 157110014
 Jurusan : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan pengawasan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru (studi kasus pasar pagi arengka).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan:

1. Bahwa naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh syarat administrasi akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 tersebut diatas maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 29 Juni 2021
 Pelaku Pernyataan



PELAKSANAAN PENGAWASAN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN
PERLENGKAPANNYA (UTTP) OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PASAR PAGI
ARENGKA)

ABSTRAK

Oleh

Muhammad Fikri

Kata Kunci : Pelaksanaan Pengawasan, Ukuran, Takaran, Timbangan dan
Perlengkapannya (UTTP)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Indikator penelitian pelaksanaan pengawasan yang digunakan adalah penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran standar pelaksanaan, pengukuran standar pelaksanaan, perbandingan pelaksanaan dengan standar, pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Tipe penelitian yang berlokasi dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ini yaitu survey deskriptif, artinya memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data kemudian data yang terkumpul dijadikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Terdapat 3 kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu pegawai dinas perindustrian dan perdagangan yang berjumlah 4 orang, pedagang pasar pagi arengka Kota pekanbaru 138 orang, dan masyarakat atau konsumen pasar pagi arengka Kota Pekanbaru sebanyak 30 orang. Jumlah keseluruhan sampel yang ditetapkan dari ketiga kelompok populasi dan sampel ini berjumlah 172 orang. Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan teknik pengumpulan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner dan wawancara kemudian data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan teknik analisis data menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Jadi, berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) pada interval penilaian Kurang Terlaksana.

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF SIZE, MEASURE, SCALES AND
EQUIPMENT (UTTP) BY THE OFFICE OF INDUSTRY AND TRADE
PEKANBARU CITY (CASE STUDY OF ARENGKA MORNING MARKET)

ABSTRACT

By

Muhammad Fikri

Keywords: Implementation of Supervision, Size, Measure, Scales and Equipment (UTTP)

This research aims to find out the Implementation of Supervision of Size, Measure, Scales, and Equipment (UTTP) by the Department of Industry and Trade pekanbaru. Indicators of supervision implementation research used are the determination of implementation standards, determination of measurement of implementation standards, measurement of implementation standards, comparison of implementation with standards, taking corrective actions when necessary. The type of research located in the office of the Office of Industry and Trade pekanbaru city is a descriptive survey, meaning prioritizing the questionnaire list as a data collection tool then the collected data is used as the main raw material to analyze empirical conditions and objectives of the existence of research objectives at the location in the research. There are 3 population groups and samples in this study, namely employees of the office of industry and trade of 4 people, traders of the morning market arengkaPekanbaru City 138 people, and the community or consumers of the morning market arengkaPekanbaru city as many as 30 people. The total number of samples determined from the three population groups and this sample amounted to 172 people. In this study using the type and technique of collecting primary data collected by using questionnaire list techniques and interviews then secondary data collected using observation techniques and data analysis techniques using frequency table tools. So, based on this analysis technique, researchers assessed and concluded that the Implementation of Supervision of Size, Measure, Scales and Equipment (UTTP) by the Office of Industry and Trade pekanbaru city (Case Study Of Arengka Morning Market) at the assessment interval Less Carried out.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan presiden yang dipilih secara langsung, Didalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang, tujuan dibaginya wilayah Republik Indonesia kedalam wilayah besar dan kecil adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan.

Negara sebagai organisasi memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tentram, aman, teratur, dan terkendali. Selain itu negara juga memiliki tanggung jawab atas pemberian perlindungan terhadap warga negara melalui salah satu tujuan negara dan yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan negara yang salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum salah satunya dilakukan dalam bentuk pemberian perlindungan terhadap masyarakat yang

dalam istilah perdagangan adalah konsumen. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Salah satu faktor penting kemajuan suatu negara adalah pertumbuhannya yang salah satunya melalui perdagangan. Tidak hanya demikian perdagangan juga menjadi salah satu profesi sebagai mata pencaharian masyarakat. Untuk menjamin keadilan dalam sektor tersebut maka diperlukan sebuah kebijakan untuk menjamin keadilan dan perlindungan dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara pelaksanaan pengawasan. Keadilan disini maksudnya yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen dalam hal penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).

Undang-Undang Perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen republik indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Khususnya Bab III Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, akan diuraikan. Hak

Konsumen terdapat pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bagian/ Bab III, yang berisi :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
2. Hak untuk Memilih, serta mendapatkan barang atau jasa yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau pengantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk itu dalam hal pemberian perlindungan terhadap konsumen didalam ruang lingkup perdagangan negara memiliki lembaga yang bertugas melakukan pengawasan yaitu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian Seksi Pengawasan Metrologi.

Dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru merupakan salah satu instansi yang berkewajiban mengawasi aktifitas perdagangan dan perindustrian di Kota Pekanbaru yang dalam penelitian ini yaitu penggunaan alat UTTP yang digunakan oleh pedagang pada pasar pagi arengka Kota Pekanbaru Melalui bidang tertib perdagangan dan perindustrian khususnya seksi pengawasan metrologi Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru,

bahwa dalam BAB IV Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian Yaitu Sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Pengaturan dan Pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk Teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolgian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri.
- b. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan kosumen.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

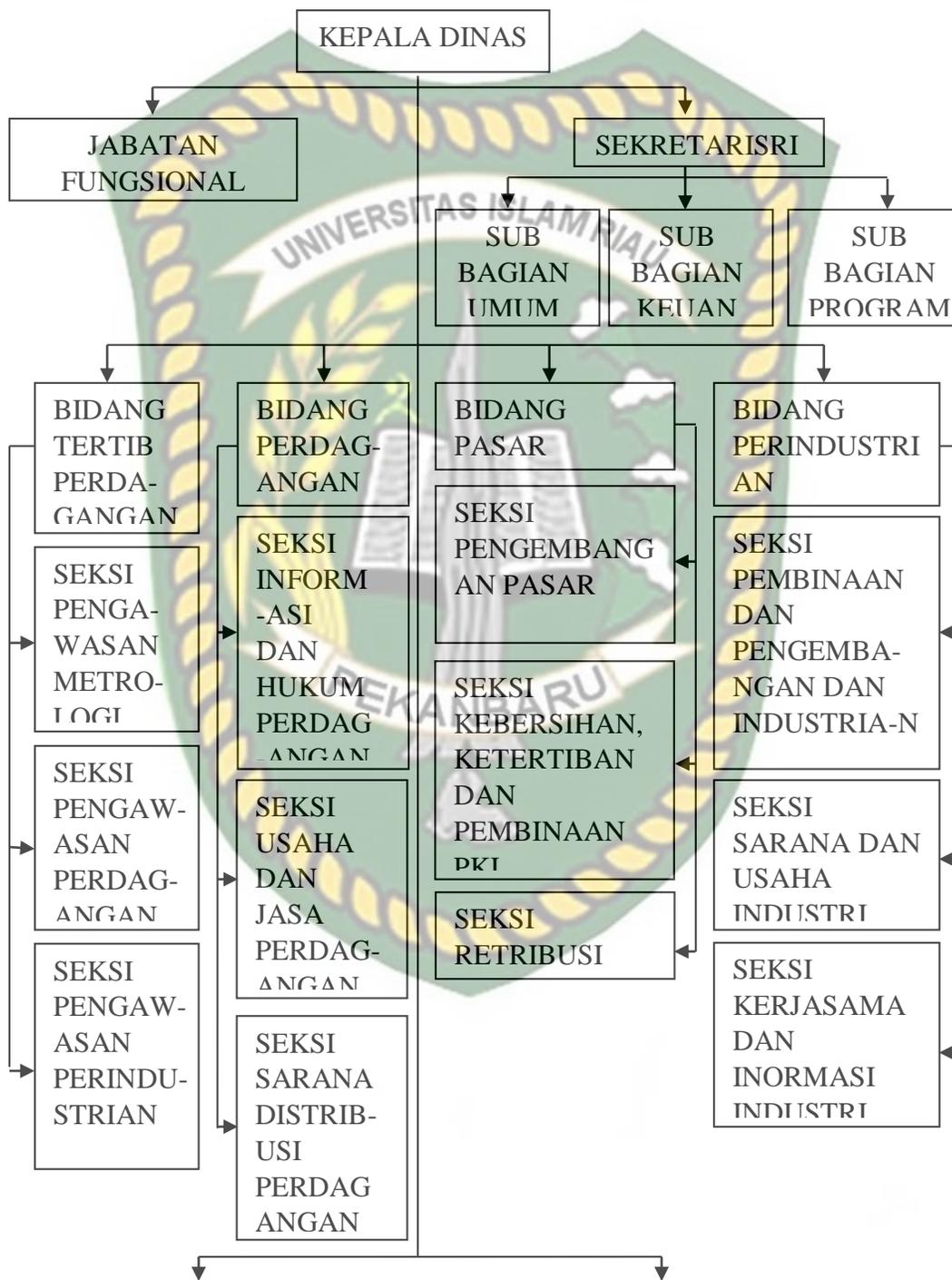
Tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Metrologi sesuai Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Yaitu sebagai berikut :

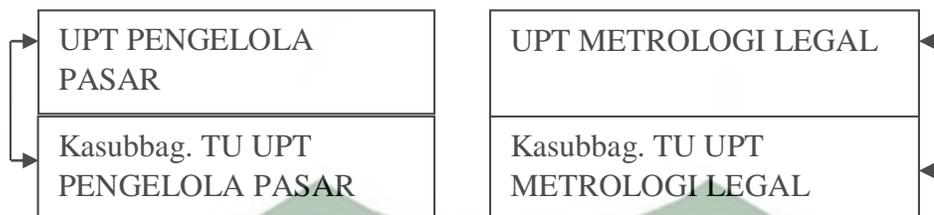
- a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang kemetrolgian.
- b. Pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang metrologi
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan UPT Metrologi dalam hal Pengawasan, penyaluran, dan evaluasi terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
- d. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari seluruh uraian tugas yang dimiliki oleh seksi pengawasan metrologi, yang mana salah satu tugasnya untuk melakukan pengawasan, penyaluran, dan evaluasi terhadap pengguna alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas, sedangkan metrologi legal adalah metrologi yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Adapun struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagai berikut :





Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2020

Menurut Undang-Undang Metrologi No 2 Tahun 1981. Pada Bab 1 Menjelaskan tentang Metrologi Legal yaitu :

- alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
- tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera; penakaran atau penimbangan.

Undang-undang metrologi nomor 2 tahun 1981 pasal 25 dilarang menaruh, mempunyai, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :

- Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang bertanda batal
- Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku.

Undang-undang metrologi nomor 2 tahun 1981 pasal 28 dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam pasal 25 undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai :

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada seharusnya
- b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya
- c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, manakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya.

Undang-undang metrologi nomor 2 tahun 1981 pasal 32 barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 25, 26, 27, 28 undang undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Dari pasal-pasal diatas dirumuskan bahwa penggunaan UTTP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. UTTP yang telah mengalami perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi sifat metrologinya, sebelum digunakan harus ditera ulang oleh pegawai yang berhak
2. Pada UTTP tidak boleh terdapat tanda-tanda khusus (minalnya garis, titik, coretan) yang memungkinkan penggunaan satuan lain yang telah ditentukan (dalam satuan Sistem Internasional dan satuan lain yang berlaku)

3. UTTP tidak boleh digunakan selain untuk peruntukannya atau fungsinya, misalnya : neraca emas tidak boleh digunakan untuk menimbang obat, timbangan keluarga tidak boleh digunakan untuk keperluan jual beli, dll
4. UTTP harus digunakan dalam kedudukan atau posisi yang telah ditentukan dalam peraturan teknis, yaitu dalam posisi datar atau rata
5. UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang muatan yang melebihi kapasitas muatannya
6. UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang kurang dari batas terendah yang telah ditentukan, atau yang disebut dengan minimum menimbang
7. UTTP yang telah ditera atau ditera ulang tidak boleh ditambah dengan alat penunjuk lainnya atau alat tambahan

Pasar pagi Arengka merupakan pasar tradisional yang di buka dari jam 05.00-19.00 letak geografis pasar pagi Arengka terletak dijalan Arengka dan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Luas pasar Arengka Pekanbaru lebih kurang 6000m diatas tanah milik Pak Pudja. Dilihat dari posisi geografisnya, Pasar Pagi Arengka pekanbaru terletak pada: -sebelah timur berbatasan dengan jalan Adi Sucipto- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Arengka Ujung- sebelah barat berbatasan dengan jalan Soebrantas Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Arengka 1. Posisi Geografis tersebut sangat strategis karena berada ditengah-tengah kota Pekanbaru dan disimpang empat, Pasar Pagi Arengka Pekanbaru adalah

Pasar Tradisional yang Menjual bermacam-macam kebutuhan seperti sayur-mayur, barang, klontong, pakaian dan kebutuhan sehari-hari.

Letak pasar yg strategis membuat pasar pagi Arengka banyak melakukan aktifitas jual beli terutama barang kebutuhan sehari-hari seperti sayur, ikan, daging dan lain sebagainya. Yang dimana aktifitas tersebut menggunakan timbangan, dalam aktifitas jual beli tersebut timbangan haruslah sesuai standar nasional Indonesia dan di tera oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru hal tersebut diperlukan supaya terlindungnya pembeli atau konsumen dari pemberatan atau kecurangan sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Didalam membantu agar aktivitas pasar yang didalam hal ini adalah perdagangan dapat berjalan dengan baik, maka salah satu infrastruktur yang diperlukan yaitu timbangan. Timbangan merupakan alat yang dipergunakan untuk mengetahui berat suatu benda atau barang.

Timbangan sangat lah penting bagi pedagang dan konsumen atau masyarakat karena ia merupakan alat yang menjadi dasar atau landasan untuk mengetahui berat suatu barang dan transaksi jual beli pun bisa sesuai dengan harga yang berlaku sehingga tidak terjadi kerugian atau pun keuntungan sebelah pihak baik dari pedagang maupun masyarakat.

Timbangan yang diperbolehkan digunakan pedagang untuk transaksi dalam jual beli sesuai undang-undang metrologi Nomor 2 tahun 1981 yaitu :

1. timbangan yang digunakan memiliki tanda tera, yang dimana tanda tera didapat setelah dilakukan pengujian oleh dinas perindustrian dan perdagangan
2. bukan timbangan keluarga (yang terbuat dari plastik) yang dimana di pasal 28 metrologi timbangan keluarga dilarang untuk berdagang, karena

timbangan yang terbuat dari plastik itu tidak memenuhi syarat untuk ditera atau ditera ulang.

Tetapi setelah penulis melakukan observasi, ditemukan pedagang yang menggunakan timbangan yang tidak memiliki tanda tera ditimbanganya dan ada timbangan keluarga dipasar pagi arengka. Fenomena yang peneliti temukan dipasar pagi arengka pada saat observasi penelitian, pada tanggal 16 Desember 2019 peneliti membeli ikan di pasar pagi arengka. Peneliti sebelumnya membeli ikan 5 ons dipasar pagi arengka selanjutnya peneliti menimbang ulang di warung dan beratnya hanya 4,5 ons atau 4 setengah ons, ikan yg dibeli dipasar kemudian ditimbang ulang kehilangan berat setengah ons.

Selanjutnya penulis berinisiatif mewawancarai Masyarakat yang berbelanja dipasar pagi arengka Pada tanggal 17 desember 2019 Tentang Kecurangan Timbangan. *“Ibu Suryati Mengaku Pernah Berbelanja Membeli Daging ayam satu Kilo setelah pulang beliau menimbang kembali belanjanya dan ternyata daging ayamnya tidak sampai satu kilo melainkan hanya 8 ons”*.

Adapun Jenis Dagangan, Jenis Timbangan ,Kapasitas Timbangan dan Jumlah Pedagang Pada Pasar Pagi Arengka sebagai berikut :

Tabel I. 1 : Jenis Dagangan, Jenis Timbangan ,Kapasitas Timbangan dan Jumlah Pedagang Pada Pasar Pagi Arengka.

NO	Jenis Dagangan	Jenis Timbangan	Kapasitas Timbangan	Jumlah Pedagang
1	Daging	Timbangan Duduk	10-30 Kg	12
2	Ayam	Timbangan Duduk	5-15 Kg	8

3	Ikan Laut	Timbangan Duduk	5-15 Kg	27
4	Ikan Sungai	Timbangan Duduk	5-15 Kg	24
5	Barang Harian	Timbangan Duduk	10 Kg	31
6	Emas	Timbangan Digital	3 Kg	1
7	Buah-buahan	Timbangan Duduk	2-15Kg	7
8	Bumbu-Cabe giling	Timbangan Duduk	2-10Kg	20
9	Sayur	Timbangan Duduk	2-15 Kg	41
10	Santan Kelapa	Timbangan Duduk	5-15Kg	11
11	Bawang-Cabe	Timbangan Duduk	2-15 Kg	10
12	Ikan Kering	Timbangan Duduk	2-10Kg	15
13	Timun-jengkol	Timbangan Duduk	2-10Kg	4
Jumlah				211

Sumber :Pengelola Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, 2019.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian negara dan juga terhadap perekonomian masyarakatnya dimana pasar juga merupakan lapangan pekerjaan sebagian besar masyarakat melalui perdagangan.

Didalam membantu agar aktivitas pasar yang didalam hal ini adalah perdagangan dapat berjalan dengan baik, maka salah satu infrastruktur yang diperlukan yaitu timbangan. Timbangan merupakan alat yang dipergunakan untuk mengetahui berat suatu benda atau barang.

Untuk itu Perlu dilakukan Pengawasan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Aktivitas jual beli barang dipasar pagi arengka. Sehingga Para Pedagang tidak melakukan Kecurangan atau pemberatan pada timbangannya.

Adapun Fenomena-Fenomena yang terjadi dilapangan dilihat dari pengamatan peneliti, yaitu :

1. Dari hasil observasi dilapangan penulis menemukan masih ada pedagang yang menggunakan timbangan yang tidak bertera sah dan timbangan plastik (keluarga).
2. Dari Hasil observasi dilapangan penulis menduga bahwa sikap tanggap, penegasan dan pengawasan dari aparatur pemerintah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru kepada Pedagang di pasar pagi arengka agar menggunakan timbangan yang standar yang diperuntukan untuk berjualan dan mentera timbangan secara berkala belum optimal dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menarik sebuah penelitian :”**Bagaiman Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa fenomena yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bahwa penelitian ini hanya terhadap objek yang melakukan proses jual beli terhadap kebutuhan pokok sehari-hari : “**Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).**”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan adanya tujuan penelitian maka seorang peneliti akan lebih terarah kemana akan difokuskan penelitian dalam pemecahan masalah. Adapun tujuan dari penulisan ini :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan alat UTTP pedagang pada pasar pagi arengka yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa dalam pelaksanaan pengawasan alat UTTP pedagang pada pasar pagi Arengka yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna teoritis, yakni dimana penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Administrasi, minimal dapat memperkaya investaris hasil-hasil penelitian dibidang Administrasi, khususnya dibidang Adminitrasi Negara.
- b. Guna akademis, yakni dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan informasi bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

- c. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam mengawasi alat UTTP pedagang pada pasar pagi Arengka Kota Pekanbaru.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi adalah kumpulan orang yang dalamnya terdapat sistem kerjasama, sistem hubungan atau sistem sosial yang kesemuanya itu baru bisa berjalan apabila ada manusia sebagai penggerak utama dalam suatu organisasi.

Menurut Siagian(2006:2) Administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (1992:2) yang memberi batasan administrasi proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilaksanakan oleh rasionalisasi tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara budaya guna dan berhasil guna (dalam Zulkifli:2005:9).

Dengan demikian administrasi sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat apabila konsep-konsep, prinsip-prinsip, rumus-rumus dan lokus fokusnya dikembangkan secara terus menerus oleh seorang manusia untuk meningkatkan kegiatan dalam organisasi maupun administrasi untuk mencapai tujuan dan memegang peranan administrasi yang diharapkan.

Menurut (Darwis dkk,2009:12) mengatakan bahwa administrasi Negara merupakan kegiatan dan tingkatan yang dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang bersangkutan.

Administrasi publik atau administrasi negara adalah batasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting yang mempelajari kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara.

Secara sederhana administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik seperti departemen-departemen dan dinas-dinas mulai tingkat kecamatan hingga tingkat pusat.

Menurut Chandeler dan Plano (dalam Pasalog, 2007:7) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk :

- a. Memformulasikan
- b. Mengimplementasikan dan
- c. Mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Dalam definisi ini lebih menekankan aspek keterlibatan personil dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Golembiewski dalam Thoha (2008:18) : “Paradigma dalam administrasi hanya dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah-istilah Lokus dan Fokusnya”.

Golembiewski lebih menegaskan pendapat Henry bahwa memahami administrasi

negara melalui pemahaman paradigma akan sampai kepada pengetahuan tentang lokus dan fokus dari bidang yang digeluti, sehingga administrasi negara akan dapat lebih dipahami secara spesifik.

Menurut Pfifner dan Presthus, Administrasi Publik adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b. Administrasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah (dalam Syafie, 2010;23).

Menurut Dimock dan Dimock administrasi publik ialah penyelenggaran pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (*policy*) karena di dalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok didalam pemerintahan (dalam Syafri 2012;22).

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Dalam hal ini seorang pemimpin ditingkat organisasi apapun dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian yang khusus peranan organisasi tertentu sangat penting guna menerapkan kemampuan dan keterampilan seorang administrator. Segala keberhasilan manusia dalam berbagai bidang kehidupan dapat dicapai melalui organisasi dan

bantuan orang lain. Manusia tidak akan dapat mewujudkan impian, cita-cita dan tujuan hidupnya. Ketergantungan pada orang lain inilah yang mendorong manusia untuk selalu dan senantiasa bekerja sama atau berorganisasi, inilah yang menyebabkan maju mundurnya kehidupan manusia, terwujudnya cita-cita manusia tersebut tergantung pada kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi, termasuk sumber daya manusia yang lebih efisien, efektif dan produktif.

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam pencapaian tujuan tertentu atau dengan bahasa lain, organisasi sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya dalam mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. (Sule dan kurniawan Saefullah 2004:4)

Menurut Wendrich, et al (dalam Brantas 2009:75) Organisasi adalah proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sutarto (dalam Brantas 2009:75) Organisasi adalah kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerja sama atau sistem sosial.

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai system apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para indivindu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk mennyelesaikan tugas yang sedemikian rupa, memberi saluran

terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Pengertian Organisasi menurut pendapat Siagian (2003:6) organisasi merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terkait dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang tersebut atasan dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.

Definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandang yaitu :

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dilaksanakan
2. Organisasi sebagai rangkai hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Menurut G.R Terry organisasi berasal dari kata (Organism) yaitu struktur dengan bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka jadi sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok yaitu bagian-bagian dari hubungan yang saling ketergantungan antara satu sama yang lainnya (dalam Zulkili 2005:14)

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) Organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan

didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013:2). Organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwasannya organisasi publik ialah salah satu tempat atau wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan hukum yang mendukungnya.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Manajemen berasal dari kata (*to manage*) yang berarti menangani, pengendalian, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu, manager adalah seorang yang diserahkan tugas memimpin atau mengurus suatu tugas, lembaga sah dan sebagainya manajemen juga sebagai ilmu dan seni kemudian manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomis sosial dan politik. Untuk sebagian besar tergantung kepada komponen para manajer organisasi yang bersangkutan. manajemen memberikan efektifitas pada pekerjaan manusia.

Menurut Antolilah (2010:14) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Hasibuhan (2014:2) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Terry (1986:2) Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

Menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel (1986:4) memberi batasan manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian dan pengendalian upaya organisasi dan menggunakan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi (dalam Siswanto 2005:98).

Menurut Stoner dan Wankel bahwa proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam batasan manajemen diatas prosesnya meliputi:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Kepemimpinan
4. Pengendalian

Menurut Fayol (Siagian 2003:84) mengatakan bahwa fungsi administrasi dan manajemen itu ialah :

1. Perencanaan

2. Pengorganisasian
3. Pemberian komando
4. Pengkoordinasian
5. Pengawasan

Kemudian manajemen merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan manajerial melalui kegiatan orang lain (Siagian 2003:5).

Manajemen pada hakikinya berfungsi untuk melaksanakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijakan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi berdasarkan konsep-konsep diatas mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan pergerakan orang-orang yang melakukan pekerjaan agar dapat mencapai tujuan secara efektif dalam sebuah organisasi.

Menurut Terry (dalam Amirullah,2004;7) Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, Pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Brantas (2009;15) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang yang kearah tujuan-tujuan organisasional.

Samsudin (2010;15) mengemukakan manajemen yaitu bekerja dengan orang dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia dan kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Manajemen publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor public seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

4. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberi pelayanan (melayani) keperluan kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi ini sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan, selanjutnya menurut kepmenpan No.63?KEP/M.PAN/72003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan perundangan-undangan :

- a. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. Waktu Penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian.
- c. Biaya tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk pelayanan hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan prasarana penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
- f. Kompetisi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan keahlian keterampilan sikap perilaku yang dibutuhkan.

Menurut Dwiyanto (2006;136) Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara sebagai pengguna pelayanan.

Menurut B. Libois (dalam Tarmizi 2015;104) pelayanan publik adalah semua kegiatan publik pemenuhan harus dijamin, diatur dan diawasi oleh pemerintah, karena itu diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan saling ketergantungan social dan pada hakikatnya, perwujudan sulit terlaksana tanpa campur tangan pemerintah.

Menurut Grongos (dalam Maulidah, 2014;39) pelayanan publik merupakan suatu rangkaian dari aktivitas dan bersifat tidak berwujud secara nyata yang merupakan hasil dari suatu proses interaksi dan unsur konsumen sebagai penerima pelayanan dengan unsur karyawan sebagai pemberi pelayanan.

Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry (dalam Dwiyanto, 2006;145) berpendapat terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu :

1. *Tangible*, seperti fasilitas fisik, peralatan personal dan bahan komunikasi yang memberikan pelayanan.
2. *Reliability* (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu.
3. *Responsiveness* (daya tanggap), para pegawai senang membantu dan mampu memberikan pelayanan yang cepat.
4. *Assurance* (jaminan), pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup, sopan dan dapat dipercaya.
5. *Empathy* (empati) perhatian yang besar khusus pegawai pada masyarakat.

Selanjutnya menurut Seotopo (dalam Napitupulu, 2007;164) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan dan mengurus apa yang diperlukan orang lain.

Dari batasan diatas, ditemukan bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.

Dan Ndaraha menjelaskan (dalam Napitupulu, 2006;166) bahwa tugas pelayanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sangat ditentukan system nilai budaya pemerintah diidentifikasi dalam tiga sistem yaitu (1) sistem nilai layanan pemerintah kepada masyarakat yang berkembang menjadi civil services dan layanan kepedulian. Melalui layanan hak masyarakat penduduk konsumen lingkungan dan setiap warga negara dipenuhi secara adil tanpa pandang bulu, diminta dan dituntut

ataupun tidak sama sekali (2) system perlindungan dan pemeliharaan dan (3) sistem nilai pengusahaan dan pengembangan.

Efisiensi pelayanan publik (dalam Dwiyanto 2006;157) dapat didefinisikan sebagai perbandingan terbaik antara input dan output, input yang dimaksudkan disini dapat berupa biaya, waktu tenaga, dari sisi input, pelayanan publik dikatakan efisien apabila pelayanan tersebut menggunakan sumbernya yang murah dan tidak boros.

Dalam (Hayat 2017;27) optimisasi pelayanan publik adalah keniscayaan bagi pemerintah dan cita-cita masyarakat. Tercapainya reformasi birokrasi dan *good governance* salah satunya adalah mempengaruhi oleh kualitas pelayanan publik yang diberikan secara optimal.

5. Konsep Pengawasan

Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003;112).

Menurut Nurholis (2005;195) pengawasan adalah kegiatan mengawasi, memiliki (mengamati), menjaga, dan mengendalikan semua kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Menurut Siagian (2003;113) meskipun efisiensi merupakan sasaran akhir dari pengawasan, ada sasaran-sasaran antara yang perlu dicapai pula. Sasaran antara itu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan, tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang digariskan dalam rencana.
2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan, serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, continue, dan sistematis.
4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal like and dislikes.

Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan atau penyalahgunaan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, dan terutama keuangan.

Menurut Efendi (2014;206) adalah merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, konsep membantu para manajer memantau efektifitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan mereka mengambil, tindakan perbaikan begitu dibutuhkan.

Menurut Terry (dalam Irham Fhami 2012;84) definisi Pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu Pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Stoner (dalam Effendi, 2015;224) mengemukakan bahwa mengenai pengawasan itu adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif. Dan fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi.

Definisi Pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler (dalam Handoko 2017,358) berikut ini telah memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan:

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Wijayanti (2008;117) Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Selanjutnya tipe pengawasan menurut Wijayanti (2008;117) yakni sebagai berikut:

- a. *Feedforward control* (kegiatan belum dilaksanakan), yaitu direncanakan untuk menantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

- b. *Conccuren Control* (kegiatan sedang dilaksanakan), yaitu merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatanpelaksanaan suatu kegiatan.
- c. *Feedback Control* (kegiatan telah dilaksanakan), yaitu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Menurut Duncan (dalam Harahap 2004;12) pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti.

Selanjutnya menurut Nurholis (2005;195) Pengawasan adalah kegiatan mengawasi, memiliki (mengamati), menjaga, dan mengendalikan semua kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Selanjutnya menurut Abdurahman (dalam Syafie,2011;110) pada beberapa faktor membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus Penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa.

1. Agama yang mendasari seseorang tersebut
2. Kebijakan yang dijalankan
3. Anggaran pembiayaan yang mendukung
4. Penempatan pegawai dan prosedur kerja
5. Kemantapan koordinasi dalam organisasi

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, Siswanto (2013;140) Menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja
- b. Mengukur kinerja
- c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar
- d. Mengambil tindak perbaikan

Pengawasan timbul karena disebabkan oleh adanya kesalahan atau penyimpangan yang terjadi didalam sebuah organisasi.

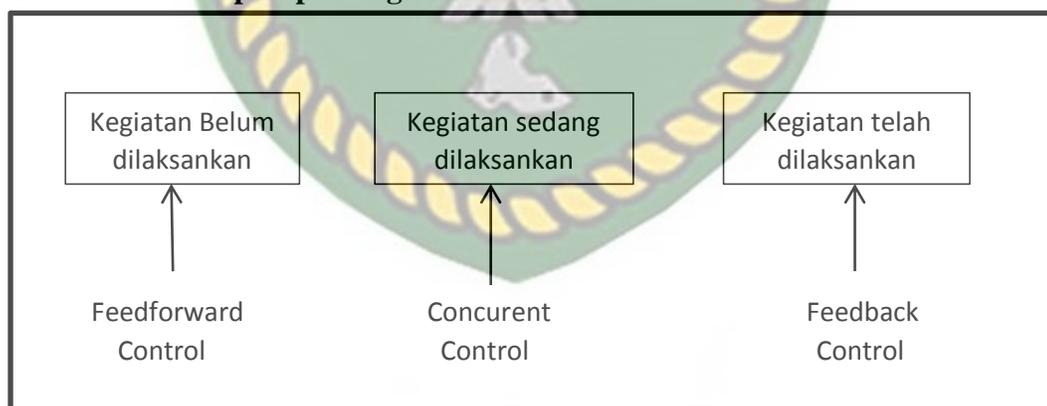
Adapun langkah-langkah pengawasan dikemukakan oleh Terry (dalam Zulkifli, 2005;209) sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar
- b. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan, laporan dan data statistik).
- c. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan
- d. Koreksi, penyusunan kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Menurut Manulang (2002 :173), Mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana

Pengawasan Menurut Handoko T. Hani (2017;359) ada tiga tipe dasar pengawasan yaitu (1) pengawasan pendahuluan, (2) pengawasan”concurrent”, dan (3) pengawasan umpan balik, seperti ditunjukkan gambar II.I berikut ini :

Gambar II.I : Tipe-tipe Pengawasan



Sumber: Handoko, 2017, 359

Menurut Handoko (2017;359) Pengawasan pendahuluan (*Feed Forward Control*).

Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk

mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.

Menurut Handoko (2017;360) pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*). Pengawasan ini, sering disebut pengawasan “ya-tidak”; *screening control* atau “berhenti-terus”; dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Handoko (2017;360) Pengawasan umpan balik (*feedback control*). Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action control*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Menurut Handoko (2017;361) mengemukakan tahapan-tahapan pengawasan yakni sebagai berikut :

- a. Penetapan standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuaa dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

Tiga bentuk standar yang umum adalah :

- a) Standar-standar fisik.
 - b) Standar-sandar moneter.
 - c) Standar-standar waktu.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan system monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu 1) pengamatan (observasi), 2) laporan-laporan, baik (lisan dan tulisan), 3) metoda-metoda otomatis dan 4) inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.

- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
- tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan . walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi

kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).

- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar mungkin di ubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersama.

6. Konsep Timbangan

a. Pengertian Timbangan

Timbangan dalam bahasa Inggris yaitu "*scales*" adalah alat ukur untuk menentukan berat atau massa benda. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

b. Jenis Timbangan

1. Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang berkerja secara mekanis dengan sistem pegas, biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
2. Timbangan digital yaitu timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik, umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.

3. Timbangan analog yaitu timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
4. Timbangan hybrid yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
5. Timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
6. Timbangan gantung yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan berkerja dengan prinsip tuas.
7. Timbangan lantai yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai.
8. Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
9. Timbangan emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

B. Kerangka Pikir

Administrasi dan manajemen publik merupakan suatu seni dan ilmu kerjasama dari dua orang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan.

Usaha untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan disebut kebijakan publik. Kebijakan publik mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas di antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar

komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkan secara efektif.

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang disusun terkait dengan penelitian ini.

Gambar II.2: Kerangka Berpikir Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Mengawasi Alat UTTP Pedagang Pada Pasar Pagi Arengka).



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2021

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian, maka perlu dijelaskan

beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (mengambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Administrasi Publik, merupakan menyangkut kerja sama kelompok orang dalam lingkup organisasi Negara (legislative, eksekutif, dan yudikatif) untuk mencapai tujuan Negara melalui berbagai kebijakan dan program yang telah dirumuskan sebelumnya.
3. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama.
4. Organisasi Publik merupakan suatu Koneksitas manusia yang kompleks dan dibentuk untuk tujuan tertentu, dimana hubungan antara anggotanya bersifat resmi (*impersonal*), ditandai oleh aktivitas kerjasama, terintegrasi dalam lingkungan yang lebih luas, memberikan pelayanan dan produk tertentu dan tanggung jawab kepada hubungan dan lingkungannya.

5. Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan juga sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
6. Manajemen Publik ialah sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.
7. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.
8. Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, merupakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan perlengkapannya oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru (studi pasar pagi Arengka) sesuai yang direncanakan.
9. Menetapkan standar, merupakan pengembangan standar pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat pekerja untuk dapat melakukan pengukuran harus

mempunyai alat pengukur dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

a. Kuantitas

Dalam hal ini jumlah personil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang melakukan pengawasan lapangan.

b. Kualitas

bagaimana proses pengawasan di lapangan apakah sudah sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan.

c. Waktu

Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengawasan.

Standar yang dimaksudkan disini ialah upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang pasar untuk menera atau menguji timbangan nya untuk keuntungan bersama dan keamanan bersama.

10. Mengadakan penilaian, merupakan ada/tidaknya penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*). Penilaian juga dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran.

a. Laporan yang di susun bawahan baik laporan rutin maupun istimewa pekerjaan atau bawahan di panggil untuk memberikan laporan.

b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil dari pekerjaan.

Penilaian yang dimaksud disini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan penggunaan timbangan dalam kelayakan transaksi jual beli barang.

11. Mengadakan tindakan perbaikan, merupakan proses dan hasil kerja terdapat penyimpangan dari standar penyimpangan dari standar yang ditentukan dan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil/dilakukan.
 - a. Petugas pengawas yaitu mengetahui penyebab yang terjadi dalam penggunaan timbangan yang tidak standar dan tidak akurat yang merugikan konsumen
 - b. Petugas pengawas yaitu memperbaiki penyebab yang terjadi dalam penggunaan timbangan yang tidak standar dan tidak akurat yang merugikan konsumen.

Perbaikan yang dimaksud disini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan perbaikan-perbaikan, maksudnya disini apabila terjadi suatu penyimpangan pada penggunaan timbangan dalam transaksi jual beli perbaikan perlu dilakukan.

D. Operasional Variabel

Table II.1 : Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru (Studi Mengawasi Alat UTTP Pedagang Pasar Pagi Arengka)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pengawasan dideinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Handoko T. Hani (2017 ; 357) Handoko	Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)	1. Penetapan standar pelaksanaan	a. Pelaksanaan undang-undang metrologi standar timbangan (UTTP) b. Pelaksanaan prosedur mengenai pengawasan UTTP pedagang pasar	- Terlaksana - Cukup terlaksana - Kurang terlaksana
		2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Kualitas dan kuantitas pengawasan dilapangan b. Kualitas dan kuantitas petugas pengawasan	- Terlaksana - Cukup terlaksana - Kurang terlaksana
		3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Laporan pengawasan baik lisan maupun tulisan b. Hasil pengawasan UTTP oleh petugas	- Terlaksana - Cukup terlaksana - Kurang terlaksana

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
		4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar	a. Penilaian pengawasan b. Penilaian inspeksi mendadak	- Terlaksana - Cukup terlaksana - Kurang terlaksana
		5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu	a. Perbaikan standar timbangan (UTTP) b. Pemberian sanksi bagi yang tidak memenuhi standar timbangan (UTTP)	- Terlaksana - Cukup terlaksana - Kurang terlaksana

Sumber :Modifikasi Peneliti, 2021.

E. Teknik Pengukuran

Teknik Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : terlaksana, cukup terlaksana, dan kurang terlaksana.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator

1. Ukuran Variabel

Terlaksana : Apabila penelitian terhadap indikator pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi kasus pasar pagi Arengka) 67-100% didapat apabila dari 5 indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 3 indikator.

Cukup Terlaksana : Apabila penelitian terhadap indikator pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi kasus pasar pagi Arengka) 34-66% Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 5 indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 2 indikator.

Kurang Terlaksana : Apabila penelitian terhadap indikator pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi kasus pasar pagi Arengka) 1-33% Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 5 indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 1 indikator.

2. Ukuran Indikator Variabel

a. Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar adalah

1. Merujuk pada undang-undang metrologi
2. berdasarkan pelaksanaan prosedur pengawasan UTTP pedagang pasar

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar berada pada skala 67-100%. Rentang skala 67-100% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 2 sub indikator.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar berada pada skala 34-66%. Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 1 sub indikator.

Kurang Terlaksana : apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar berada pada skala 1-33%. Rentang skala 1-33% didapat apabila tidak ada sub indikator yang terlaksana.

b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan merujuk pada

1. Kualitas dan kuantitas pengawasan lapangan.
2. kualitas dan kuantitas petugas pengawasan

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 67-100%. Rentang skala 67-100% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 2 sub indikator.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 34-66%. Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 1 sub indikator.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 1-33%. Rentang skala 1-33% didapat apabila tidak ada sub indikator yang terlaksana.

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan berdasarkan

1. Laporan pengawasan baik lisan maupun tulisan
2. Hasil pengawasan UTTP oleh petugas

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 67-100%. Rentang skala 67-100% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 2 sub indikator.

Cukup terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 34-66%. Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 1 sub indikator.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 1-33%. Rentang skala 1-33% didapat apabila tidak ada sub indikator yang terlaksana.

d. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar

Perbandingan pelaksanaan dengan standar merujuk pada

1. Penilaian pengawasan
2. Penilaian inspeksi mendadak

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 67-100%. Rentang skala 67-100% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 2 sub indikator.

Cukup terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 34-66%. Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 1 sub indikator.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 1-33%. Rentang skala 1-33% didapat apabila tidak ada sub indikator yang terlaksana.

e. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Pengambilan tindakan koreksi merujuk pada

1. Laporan pengawasan baik lisan maupun tulisan
2. Hasil pengawasan UTTP oleh petugass

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 67-100%. Rentang skala 67-100% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 2 sub indikator.

Cukup terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 34-66%. Rentang skala 34-66% didapat apabila dari 2 sub indikator pelaksanaan yang terlaksana adalah 1 sub indikator.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penentuan pengukuran berada pada skala 1-33%. Rentang skala 1-33% didapat apabila tidak ada sub indikator yang terlaksana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk Mempermudah Penulis mendapatkan data dan informasi, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian survey deskriptif, karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasilnya.

Penelitian deskriptif adalah sangat penting untuk tiap disiplin ilmu, khususnya pada tahap awal perkembangan, meskipun hal ini dapat bervariasi. penelitian deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang situasi khusus, *setting social*, atau hubungan (Silalahi, 2012)

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori (bukan Sekedar Pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti (Sugiono, 2012:63). Adapun tipe penelitian deskriptif menurut Mayer dan Green Wood yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskripsi kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa.

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono (2012;8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk instrument

penelitian, analisis data bersifat Kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yaitu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena dinas ini merupakan dinas yang mengurus dan melakukan pengawasan terhadap Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

Lokasi penelitian ini dipilih di kota Pekanbaru. Adapun pertimbangan penulis memilih kota Pekanbaru sebagai objek penelitian yaitu karena berdasarkan fenomena yang ada, Karena di Kota Pekanbaru Penulis melihat dan mengamati terdapat ketidak sesuaian antara peraturan dan penerapan terhadap kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru (Studi Mengawasi alat UUTP Pedagang Pada Pasar Pagi Arengka).

C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiono (2007;90) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel menurut Sugiono (2007;91) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus representative (mewakili).

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 1 Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, 1 Kepala seksi Pengawasan Metrologi, 1 Kepala UPT Metrologi, Pedagang Pasar Pagi Arengka, Masyarakat (Konsumen).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table populasi dan sample Penelitian dibawah ini:

Table III. I Table Populasi dan Sample Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

No	Keterangan	Populasi	Sample	Persentase
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala Bidang Tertib dan Perdagangan Perindustrian	1	1	100%
3	Kepala Seksi Pengawasan Metrologi	1	1	100%
4	Kepala UPT Metrlogi Legal	1	1	100%
5	Pedagang Pasar Pagi Arengka	211	138	65%
6	Masyarakat (Konsumen)	~	30	~
	Jumlah	215	172	-

Sumber Modifikasi Penulis, 2021

Dari tabel diatas, penarikan sampel pada masyarakat menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N e^{-2}}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Presentase kelonggaran atau ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir.

Penghitungan sampel masyarakat dari populasi 211;

$$n = \frac{N}{1 + N e^{-2}}$$

$$n = \frac{211}{1 + (211) (0,05)^2}$$

$$n = \frac{211}{1 + (211) (0,0025)^2}$$

$$n = 138$$

Dari hasil diatas, maka didapat sampel sebanyak 138

Persentase Sampel

$$\text{Sampel/ Populasi} \times 100\% = 138/211 \times 100\% = 65\%$$

D. Teknik Penarikan Sampel

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiono, 2012;91).

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun penarikan sample dalam Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Seksi Pengawasan Metrologi, Kepala UPT Metrologi, Menggunakan Teknik Sensus atau sampling jenuh yaitu dengan mengambil keseluruhan populasi menjadi sample, karena jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti. untuk pedagang pasar pagi arengka menggunakan teknik *random sampling*. Teknik Random Sampling menurut Sugiyono (2017;82) yaitu dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan

strata yang ada dalam populasi itu. menggunakan teknik *random sampling* dengan menetapkan jumlah reponden sebanyak 138 orang dan dirasakan cukup mewakili responden yang lainnya.

Sedangkan masyarakat (Konsumen), menggunakan teknik *Incidental sampling* yaitu teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, siapa saja yang ditemui dan dianggap cocok dijadikan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang di peroleh langsung dari responden melalui wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian pelaksanaan pengawasan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi kasus pasar pagi Arengka)

2. Data Skunder

Merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka). Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Uraian tugas dan fungsi dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru.

- b. Data lain sebagainya yang menyangkut dengan permasalahan dalam penelitian, yang diperoleh melalui buku, dokumen dan data yang berkaitan dengan masalah penelitian dan yang dianggap perlu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari informasi yang lebih valid, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung oleh penulis terhadap objek penelitian dilapangan tempat penelitian dilaksanakan, sehingga data yang dikumpulkan lebih lengkap, seperti pengamatan terhadap pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru terhadap UUTP yang digunakan oleh pedagang pada Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.

2. Wawancara (Interview)

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden, penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam proses pengumpulan data dan informasi.

3. Kuisisioner (Angket)

Selain wawancara penulis juga menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data yaitu penulis membagikan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden untuk mengali informasi tentang Observasi mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawasi alat UUTP pedagang pada pasar pagi Arengka kota Pekanbaru.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen, baik berupa foto, rekaman, maupun lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya setelah itu dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain dalam aspek yang diteliti.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru (Studi Pasar Pagi Arengka) .

Tabel III.2 : Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).

No	JenisKegiatan	Bulan dan Mingguke																							
		Juli				Agustus				Septem-ber				Oktobe-r				Novem-ber				Desem-ber			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfrehensif																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber :ModifikasiPenulis, 2020

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai ibukota Provinsi Riau. Dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang memiliki luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak diantara 0⁰ 25' - 0⁰ 45' Lintang Utara dan 101⁰ 14' - 101⁰ 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Dibagian Utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Dibagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
- Dibagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 km² menjadi ± 446, 50 km² , terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan atau desa. kemudian dengan peraturan Daerah Pekanbaru No. 4 tahun 2003 menjadi 12 kecamatan, meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Unuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 tahun 2020 menjadi 15 kecamatan diantaranya : Bukit Raya, Tenayan Raya, Kulim, Rumbai, Rumbai Timur, Rumbai Barat, Payung Sekaki, Marpoyan Damai, Sukajadi, Senapelan, Sail, Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Tuah Madani, BinaWidya dan Kelurahan atau Desa menjadi 83 Kelurahan atau Desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai seperti : Air Hitam, Sungai Umban Sari, Setukul, Siban, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail, Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman kekota serta daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34, 1derajat celcius sampai dengan 35, 6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20, 2 derajat celcius sampai dengan 23, 0 derajat celcius. Curah hujan antara 38, 6 sampai dengan 435, 0 mm/ tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan januari sampai dengan April dan September sampai dengan Desember
- Musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan Agustus. (Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru).

B. Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru beralamat di jalan Teratai No, 83, Telp, (0761) 21669, 25174 Fax (0761) 25174 Pekanbaru 28127.

Perkembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

a. Tahun 1991

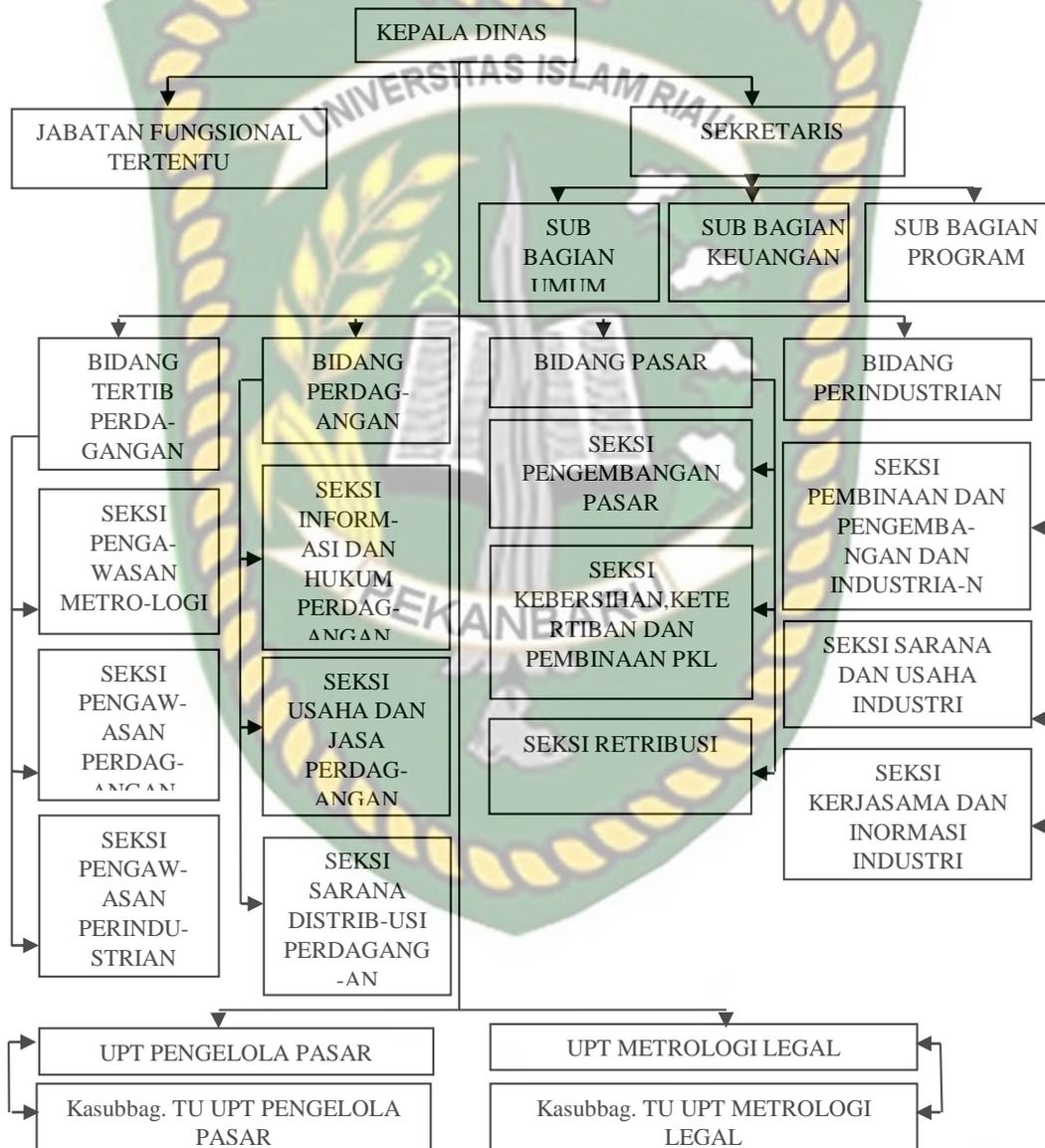
Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya bernama kantor departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Pekanbaru.

b. Tahun 2001

Berdasarkan UU Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999 melalui peraturan Daerah (PERDA) No 07 tahun 2001 Pemerintah daerah Kota Pekanbaru membentuk Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. H. Amir Husein
2. Drs. H. Kustalani Rahman, M. Si
3. H. Suraji, SH
4. Ir. Hj. El Syabrina MP
5. Drs. Igot Ahmad Hutasaht (yang saat ini menjabat)

C. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
Gambar IV. 1: Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2020

D. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan lima tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

“Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna untuk menunjang ekonomi kerakyatan”

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata
- Menumbuh kembangkan perdagangan dan industri yang berwawasan lingkungan
- Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas profesionalisme dibidang perdagangan dan industri
- Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab
- Menyediakan informasi perdagangan dan industri yang akurat
- Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar serta perlindungan konsumen

1. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

2. Fungsi

Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah merumuskan suatu kebijakan teknis yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum pada bidang perindustrian dan perdagangan
2. Merumuskan kebijakan, pelaksanaan teknis dan penyusunan, serta pemberian bimbingan dan penyuluhan pada bidang perindustrian dan perdagangan
3. Penyelenggaraan kebijakan umum dan pelayanan teknis pada bidang perdagangan dan perindustrian
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian, pembinaan pegawai dilingkungan dinas perindustrian dan perdagangan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan perubahan terhadap susunan organisasi, kedudukan dan tugas-tugas pokok hingga saat ini

Dalam susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terdapat tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian yaitu :

1. Kepala Dinas

Tugas pokok

Membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantu lainnya berdasarkan Azas Otonomi Daerah.

Fungsi

1. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pada bidang perindustrian dan perdagangan
2. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan serta melakukan pelaksanaan tugas dibidang industri dan perdagangan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup tugasnya

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi, penatausahaan, urusan kepegawaian, umum / perlengkapan, keuangan dan penyusunan program

Sekretariat mennyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tata usaha
- b. Pengelolaan administrasi keuangan
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan perlengkapan
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan pelaksanaan rapat dinas dan upacara serta ke protokolanan sekretariat terdiri dari 3 sub bagian diantaranya :
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian program

Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris.

1) Sub bagian umum

Tugas Pokok

Sub bagian umum mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan program kerja sub bagian umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan, dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku

2. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi sub bagian umum
3. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat
4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas
5. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas
6. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah
7. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah
8. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruang dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkup dinas
9. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok

Sub bagian keuangan mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan program kerja sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan pengegelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pelaksanaan verifikasi sera meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran
3. Penyiapan surat perintah membayar
4. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan
5. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggung jawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
6. Pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas
7. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan laporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Penyimpanan dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Program

Tugas pokok

Sub Bagian Program memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sub bagian program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

1. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran perusahaan
2. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi, dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export import

dan teknis pembinaan sarana dan prasarana usaha perdagangan, pengelolaan izin usaha perdagangan

3. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen
4. Pengoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu
5. Pengoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha
6. Pengoordinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan urusan perdagangan.

1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan
2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
3. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.

1) Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan

Tugas Pokok

Membantu kepala bidang perdagangan dalam melaksanakan sub urusan informasi dan hukum perdagangan.

Fungsi

1. Penyusunan program kerja
2. Pelaksanaan pelayanan umum
3. Penyediaan tentang data wajib daftar perusahaan
4. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan

5. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama
6. Pengelolaan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data wajib daftar perusahaan
7. Pengelolaan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri
8. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya
9. Penginventarisasian permasalahan dan penyipan bahan petunjuk emecahan masalah
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan

Tugas Pokok

Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan mempunyai rincian tugas membantu kepala bidang perdagangan dalam sub urusan usaha dan jasa perdagangan.

Fungsi

1. Penyusunan program kerja
2. Pelaksanaan pelayanan umum
3. Penyediaan tentang data wajib daftar perusahaan
4. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan
5. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama
6. Pengelolaan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data wajib daftar perusahaan
7. Pengelolaan, penyajiian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri
8. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya
9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
10. Pelaksanan tgas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Tugas Pokok

Seksi sarana Distribusi Perdagangan mempunyai rincian tugas membantu kepala bidang perdagangan dalam sub urusan Sara Distribusi Perdagangan.

Fungsi

1. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan atau penyediaan BBM diwilayah Kota
2. Pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen pangkalan dan sampai kosumen akhir diwilayah kota
3. Peningkatan barang-barang ekspor, pengawasan terhadap mutu barang-barang impor dan yang akan diekspor
4. Persiapan, meneliti dan memproses terhadap permohonan penerbitan angka impor
5. Pemerosesan permohonan, pemberian, pencabutan angka pengenal impor dan ekspor
6. Pendataan, evaluasi dan pendataan terhadap pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor
7. Penyusunan program kerja
8. Pelaksanaan pelayanan umum
9. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan
10. Pengekoordinasian dengan unit kerja lainnya
11. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
12. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perindustrian

Tugas Pokok

Bidang perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan urusan perindustrian.

Fungsi

1. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industry
2. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan
3. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong
4. Promosi produk industri
5. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan standarisasi
7. Penerapan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan pembinaan industri
8. Pelaksanaan fasilitas akses permodalan
9. Pemberian fasilitas kemitraan dan kerjasama
10. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah serta industri kreatif
11. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri
12. Penyusunan tata ruang industri
13. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri
14. Pendataan, analisis dan deseminasi data industri
15. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri
16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan industri
2. Seksi Sarana dan Usaha Industri
3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri**Tugas Pokok**

Seksi pembinaan dan pengembangan Industri mempunyai rincian tugas membantu kepala bidang perindustrian dalam sub urusan pembinaan pengembangan industri.

Fungsi

1. Penyusunan program dan rencana kegiatan
2. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja
3. Perumusan dan pelaksanaan fasilitas usah dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah serta industri kreatif
4. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong
5. Penyusunan bimbingan teknis, terhadap mutu hasil produksi, penerapan standarisasi dan membantu kelancaran pengadaan peralatan bahan baku, bahan pembantu, barang modal serta pengembangan diverifikasi produk
6. Penyediaan fasilitas akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank
7. Pembinaan terhadap asosiasi industri atau dewan industri daerah
8. Perumusan dan penetapan standar kompetensi SDM indutri dan membentuk aparatur pembinaan industri daerah
9. Penyiapan dan pengusulan diklat SDM industri dan aparatur pembinaan industri
10. Penyusunan bahan bimbingan pembinaan dalam pemilihan dan penggunaan bahan baku atau bahan pembantu

11. Perumusan pelaksanaan penelitian pengembangan dan pemanfaatan teknologi bidang industri
12. Perumusan dan pelaksanaan sosialisasi teknologi bidang industri
13. Pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) **Seksi Sarana Dan Usaha Industri**

Tugas Pokok

Seksi Sarana dan Usaha Industri mempunyai rincian tugas membantu kepala bidang perindustrian dalam sub urusan Sarana dan Usaha Industri.

Fungsi

1. Penyusunan program dan rencana kegiatan
2. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja
3. Perumusan dan penciptaan industri yang layak dan terhindar dari produksi limbah berbahaya
4. Pemberian rekomendasi usaha industri atau pindah usaha industri atau perusahaan usaha industri dan kawasan industri
5. Pemberian perlindungan kepastian usaha
6. Penetapan bidang usaha industri unggulan dan prioritas daerah
7. Pelaksanaan promosi produk industri daerah
8. Perumusan dan pengembangan sarana dan kemampuan sarana
9. Pengajuan pembentukan UPT/ unit usaha industri
10. Penyusunan rencana kerja industri meliputi pembangunan jangka menengah
11. Perumusan dan penyusunan tata ruang industri
12. Pelaksanaan pendataan, analisi dan desiminasi data serta pelaporan keperintah provinsi
13. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencemaran lingkungan
14. Pelaksanaan pembinaan HKI dan desain produk industri

15. Pelaksanaan pengawasan dan fasilitas standarisasi bidang industri
16. Penyusunan petunjuk teknis pendataan dan pemutahiran data industri kecil dan besar, serta bimbingan terhadap kelompok usaha bersama
17. Pelaksanaan pendataan laporan produksi usaha industri
18. Pengendalian, pengawasan, evaluasi, pembinaan, dan pelaporan
19. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi kerjasama dan Informasi Industri

Tugas Pokok

Seksi Kerjasama dan Informasi Industri mempunyai rincian tugas membantu kepala bidang perindustrian dalam sub urusan kerjasama dan informasi industri.

Fungsi

1. Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan
2. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja
3. Perumusan kegiatan dan pelaksanaan promosi produk industri
4. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama antar usaha industri
5. Perumusan peningkatan dan pengembangan sistem informasi industri bagi kalangan internal dan eksternal
6. Pelaksanaan fasilitas kemitraan, kerjasama dalam pengembangan industri, antara industri kecil, menengah, besar, dan sektor ekonomi lainnya
7. Perencanaan pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri
8. Pengekoordinasian pelaksanaan pengembangan peluang investasi sektor industri
9. Pengekoordinasian pembinaan agro industri serta industri hasil hutan
10. Pengekoordinasian pembinaan industri logam, mesin, elektronika dan aneka
11. Melaksanakan pelayanan umum
12. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan

13. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengembangan peluang investasi sektor industri, agro industri, industri hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka
14. Pelaksanaan koordinasi perumusan pembinaan industri kecil
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pasar

Tugas Pokok

Bidang Pasar Mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar.

Fungsi

1. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar didalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan
2. Perumusan seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar
3. Pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistmatisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada
4. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar
5. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar
6. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar
7. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja
8. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan

9. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan dibidang ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar
10. Pengoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait
11. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pasar
12. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar
13. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungutan retribusi pengelolaan pasar dengan kepala bagian tata usaha
14. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi pasar yang ada didalam lingkungan pasar
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pasar Terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan
2. Seksi, Kebersihan, Ketertiban, dan pembinaan PKL
3. Seksi Retribusi.

1) Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan

Tugas Pokok

Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala bidang pasar dalam sub urusan pengembangan pasar dan pengawasan.

Fungsi

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja
2. Penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pengembangan pasar

3. Penelitian retribusi dan pengelolaan pasar, penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar
4. Penyusunan program kerja
5. Pelaksanaan pelayanan umum
6. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya
7. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
8. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pemimpin
9. Pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Pelaksanaan program/ laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar
11. Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar
12. Pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar
13. Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas lainnya.

2) Seksi Kebersihan, Keteriban, dan Pembinaan PKL

Tugas Pokok

Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan pembinaan PKL mempunyai tugas membantu kepala bidang pasar dalam sub urusan Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL.

Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja
2. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja
3. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar

4. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan tugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar
5. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan didalam lingkungan pasar
6. Penyiapan bahan dan peralatan kerja
7. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar
8. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan didalam lingkungan pasar
9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
10. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan
11. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan
12. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima
13. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan kebersihan pembinaan pedagang
14. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi
15. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima kearah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan
16. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pedagang kaki lima
17. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Retribusi

Tugas pokok

Seksi Retribusi mempunyai tugas membantu kepala bidang pasar dalam sub urusan Retribusi.

Fungsi

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja
2. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar
3. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi metrologi
4. Pemeliharaan dokumen penagihan secara teratur kepada wajib retribusi
5. Penyelesaian tunggakan-tunggakan dari wajib retribusi berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait
6. Penginventarisasian permasalahan dari penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
7. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan
8. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
9. Pengelolaan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan sub yang terkait
10. Penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar
11. Penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar
12. Penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar
13. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi pengelolaan pasar yang ada dilingkungan pasar berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait
14. Pelaksanaan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar,

6. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian

Tugas Pokok

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib Perdagangan dan Perindustrian.

Fungsi

1. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolgian, dan kepemilikan izin tanda usaha industri
2. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil
3. Penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan, termasuk didalamnya penimbunan pergudangan
4. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang mengolah data, pengawasan, penyuluhan, dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan kosumen
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

1. Seksi pengawasan metrologi
2. Seksi pengawasan perdagangan
3. Seksi pengawasan perindustrian.

1) Seksi Pengawasan Metrologi

Tugas Pokok

Seksi Pengawasan Metrologi mempunyai tugas membantu kepala bidang tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam sub urusan pengawasan metrologi.

Fungsi

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang kemetrolgian
2. Pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang metrologi
3. Pelaksanaan koordinasi dengan UPT metrologi dalam hal pengawasan, penyaluran dan evaluasi terhadap penggunaan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengawasan Perdagangan

Tugas pokok

Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu kepala bidang Tertib perdagangan dan Perindustrian dalam sub urusan Pengawasan Perdagangan.

Fungsi

1. Pengoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa
2. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional
3. Pengoordinasian, pembinaan keterampilan sektor industri dan perdagangan
4. Pengoordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan
5. Pengoordinasian, pembinaan dengan industri terkait sesuai dengan bidang tugasnya
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengawasan Perindustrian

Tugas Pokok

Seksi Pengawasan Perindustrian mempunyai tugas membantu kepala bidang tertib perdagangan dan perindustrian dalam sub urusan Pengawasan Perindustrian.

Fungsi

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja
2. Pembinaan kelancaran arus barang, perdagangan antar wilayah, monitoring harga, pengadaan dan penyaluran serta stok bahan pokok kebutuhan masyarakat
3. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan
4. Penyediaan dokumen yang diperlukan pimpinan
5. Pengekoordinasian dengan unit kerja lainnya
6. Pelaksanaan pengawasan kualitas barang atau jasa, kesehatan, keamanan dan kenyamanan
7. Pelaksanaan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital dalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah dibidang perindustrian dan perdagangan. Terkait hal tersebut, berikut ini data sumber daya manusia ataupun data kepegawaian dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Tabel IV. 1 : Distribusi jumlah Pegawai Negeri Sipil pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Pendidikan					Golongan				Pejabat Eselon			
SD	SLTP	SLTA	D1/2/3	S1/2/3	I	II	III	IV	I	II	III	IV
-	-	22	2	45	2	17	39	11	4	2	21	22

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan data yang diperoleh dari aparat petugas, Pedagang Pasar Pagi Arengka, dan masyarakat yang terpilih menjadi sampel untuk memberikan penjelasan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) data tersebut didapat dari wawancara dan kuisioner yang telah disebarakan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Tertib Perindustrian dan Perdagangan, Kepala seksi Pengawasan Metrologi, Kepala UPT Metrologi, masyarakat/kosumen, Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru.

Hasil kuisioner dan wawancara yang diperoleh sejumlah data yang diperlukan seperti : data identitas responden dan tanggapan responden tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru).

A. Identitas Responden

Identitas Responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data kuisioner yang disebarakan oleh penulis yang berisikan mengenai nama, umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan responden. Adapun hasil pertanyaan tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur genetika dari responden yang menilai Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V. 1 berikut:

Tabel V. 1 : Identitas Responden Pegawai Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	3	75%
2	Perempuan	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V. 1 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang atau 75% responden, dan 1 orang perempuan 25% responden, untuk menilai Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka). Jadi, kesimpulan dari penjelasan diatas responden bahwa pegawai mayoritasnya adalah berjenis kelamin laki-laki.

Tabel V.2 : Identitas Responden Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin dalam penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	103	74%
2	Perempuan	35	26%
Jumlah		138	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V. 2 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 103 orang atau 74% responden, dan 35 orang perempuan atau 26% responden, untuk menilai Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka). Jadi, kesimpulan dari penjelasan diatas responden bahwa Pedagang Pasar Pagi Arengka mayoritas adalah berjenis kelamin laki-laki.

Tabel V.3 : Identitas Responden Masyarakat/Konsumen Menurut Jenis Kelamin dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki- laki	6	20%
2	Perempuan	24	80%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V. 3 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang atau 20 % responden, dan 24 orang perempuan atau 80% responden, untuk

menilai Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka). Jadi, kesimpulan dari penjelasan diatas responden bahwa masyarakat/Konsumen mayoritas adalah berjenis kelamin Perempuan.

2. Umur Responden

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok umur, disini penulis mengelompokkan umur responden dengan cara tingkatan, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel V. 4 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel V. 4 : Identitas Responden Pegawai Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	-	-
2	31-40	2	50%
3	41-50	2	50%
4	50 >	-	-
Jumlah		4	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V. 4 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan tingkat umur, maka penelitian dapat Mengemukakan bahwa tingkat umur responden berada pada tingkatan 31-40 Tahun berjumlah 2 orang atau 50%, dan umur responden pada 41-50 Tahun berjumlah 2 orang atau 50%, jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapat yakni sama-sama 50% pada umur 31-40 Tahun dan 41-50 Tahun.

Tabel V.5 : Identitas Responden Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	26	19%
2	31-40	64	46%
3	41-50	45	33%
4	50 >	3	2%
Jumlah		138	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V. 5 diatas, dalam pengelompokkan identitas responden dari Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru berdasarkan tingkat umur, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur responden berada pada tingkatan 31-40 tahun berjumlah 64 orang atau 46%, kemudian umur responden pada 41-50 tahun berjumlah 45 orang atau 32%, umur responden pada 20-30 tahun berjumlah 26 orang atau 18%, dan umur responden pada 50 > tahun berjumlah 3 orang atau 4%, jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada umur 31-40 tahun.

Tabel V.6 : Identitas Responden Masyarakat/Konsumen Menurut Umur dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	11	37%
2	31-40	15	50%
3	41-50	4	13%
4	50 >	-	-
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V. 6 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari masyarakat/konsumen berdasarkan tingkat umur, maka penelitian dapat mengemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur responden berada pada tingkatan 31-40 tahun yang berjumlah 15 orang atau 50%, kemudian umur responden 20-30 tahun yang berjumlah 11 orang atau 37%, dan umur responden pada 41-50 tahun berjumlah 4 orang atau 13%, jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada umur 31-40 Tahun.

3. Pendidikan Responden

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada penelitian ini terdapat juga identitas tingkat pendidikan terkait, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel V. 7 : Identitas Responden pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	-	-
4	D.III	-	-
5	Sarjana	4	100%
Jumlah		4	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V. 7 diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden pegawai sebanyak 4 orang atau 100% merupakan lulusan Sarjana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk tingkatan pendidikan terakhir responden Pegawai seluruhnya lulusan SLTA.

Tabel V. 8 : Identitas Responden Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	9	7%
2	SLTP	46	34%
3	SLTA	75	54%
4	D.III	3	2%
5	Sarjana	5	3%
Jumlah		138	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V. 8 diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden Pedagang Pada Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, dimana terlihat pendidikan tertinggi adalah SLTA berjumlah 75 orang atau 54% kemudian SLTP 46 orang atau 34% SD berjumlah 9 orang atau 7% Sarjana 5 orang atau 3% dan Terakhir D. III berjumlah 3 orang atau 2%. Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk responden Pedagang Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru lebih banyak adalah lulusan SLTA.

Tabel V. 9 : Identitas Responden Masyarakat/Konsumen Menurut Tingkat Pendidikan dalam Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	4	13,5%
3	SLTA	22	73%
4	D.III	-	-
5	Sarjana	4	13,5%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan Tabel V. 9 diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden masyarakat/konsumen dimana terlihat pendidikan tertinggi adalah SLTA berjumlah 22 orang atau 73%, kemudian SLTP berjumlah 4 orang atau 13,5% dan Sarjana berjumlah 4 orang atau 13,5%. Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk responden masyarakat/konsumen lebih banyak adalah lulusan SLTA.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Untuk Melihat Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) Maka Penulis uraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan artinya tahapan pertama dalam pengawasan, standar mengandung arti sebagai satuan-satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Yang mana dalam hal ini ialah Timbangan harus sesuai dengan standar peraturan yang berlaku seperti yang terdapat dalam undang-undang No. 2 tahun 1981 tentang metrologi.

UTTP yang dipergunakan harus memenuhi syarat teknis, persyaratan kemetrologian, pemeriksaan dan pengujian serta pembubuhan cap tanda tera.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) untuk Penetapan Standar Pelaksanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 10 : Distribusi Tangapan Responden Mengenai Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Undang-Undang Standar Timbangan	35	76	61	172

2	Standar-Standar Timbangan Pasar	25	81	66	172
3	Pelaksanaan Standar Timbangan	30	54	88	172
4	Prosedur Pengawasan Timbangan Pasar	45	76	51	172
5	Pelaksanaan Pengawasan Timbangan Pasar	34	74	64	172
Jumlah		169	361	330	860
Rata-Rata		33,8	72,2	66	172
Persentase		19%	42%	39%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan indikator dari tabel V. 10 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) Berdasarkan pada tabel tangapan responden terhadap indikator Penetapan standar pelaksanaan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat rata-rata sebanyak 33,8 serta persentase 19% dengan kategori penilaian “Terlaksana”, kemudian sebanyak 72,2 serta persentase 42% dengan kategori penilaian “Cukup Terlaksana”, dan sebanyak 66 serta persentase 39% dengan kategori penilaian :Kurang Terlaksana”. Untuk indikator penilaian tertinggi adalah “Cukup Terlaksana” dengan persentase 42%, maka dari itu diharapkan telah tercapai dengan baik dan lebih ditingkatkan lagi oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Terkait Timbangan demi kenyamanan masyarakat atau konsumen.

Sementara itu dari hasil wawancara terhadap ibu Hj. Parhatun. S.si (Kepala Seksi Pengawasan Metrologi) mengenai indikator pertama, yaitu Menurut Ibu, apakah ada kejelasan kejelasan peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang standar timbangan di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru? Beliau menjawab :

“Undang-Undang tersebut ada, Undang-Undang Metrologi Nomor 2 tahun 1981 tentang standar metrologi, kemudian untuk pelaksanaan kami melaksanakannya sesuai dengan tugas kami masing-masing serta melakukan pengawasan untuk timbangan itu sendiri, dan sejauh ini saya melihat petugas sudah cukup melaksanakan berdasarkan apa yang sudah ditentukan. “ (wawancara, hari/tanggal : kamis 15 april 2021).

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang peneliti temukan pada indikator penetapan standar pelaksanaan yaitu, beberapa Timbangan pedagang dipasar pagi arengka telah menerapkan standar timbangan yang berlaku, dan penerapan standar timbangan tetap terus diupayakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait

agar tidak ada lagi Timbangan yang tak layak pakai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan Undang-Undang Metrologi Nomor 2 Tahun 1981, tetapi sebagian masih terdapat timbangan yang belum memenuhi standar masih digunakan pedagang dipasar pagi arengka kota pekanbaru.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penentuan Pengukuran Pelaksanaan kegiatan ialah penetapan standar sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka). Pada tahap ini menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Timbangan Pedagang secara tepat. Pengukuran juga sebaiknya mudah dilaksanakan, serta dapat diterangkan baik kepada petugas maupun unsur-unsur terkait.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) untuk Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan kegiatan dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 11 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan kegiatan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Pengukuran Pengawasan	35	40	97	172
2	Pelaksanaan Kualitas Pengawasan	28	50	94	172
3	Penegasan Petugas	23	38	111	172
Jumlah		86	128	302	516
Rata-Rata		28,67	42,67	100,67	172
Persentase		17%	24%	59%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan indikator dari tabel V. 11 diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) Berdasarkan pada tabel tanggapan responden terhadap indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat rata-rata sebanyak 28,67 serta persentase 17% dengan kategori penilaian “Terlaksana”, kemudian sebanyak 42,67 serta persentase 24% dengan kategori penilaian “Cukup Terlaksana”, dan sebanyak 100,67 serta persentase 59% dengan kategori penilaian “Kurang Terlaksana”

Sementara itu dari hasil wawancara terhadap ibu Hj. Parhatun. S.si (Kepala Seksi Pengawasan Metrologi) mengenai indikator kedua, yaitu menurut Ibu, Bagaimana Pelaksanaan Standar-standar Timbangan (metrologi) pedagang pada pasar pagi arengka oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru? Beliau Menjawab :

“Untuk saat ini, Pelaksanaanya sudah terlaksana dengan baik dan petugas dan saya telah menjalankan sesuai intruksi yang kami terima. Dan untuk timbangan yang digunakan pedagang yang tidak memenuhi standar itu berdampak kepada pedagang karena ada sanksi yang akan diberikan dan berdampak pula kepada masyarakat/konsumen karena kita harus menjamin kenyamanan, keselamatan, keamanan didalam transaksi jual beli dimana timbangan sebagai alat takar nya”. (wawancara, hari/tanggal : kamis 15 april 2021).

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak yang terkait terhadap pengawasan timbangan (metrologi) pedagang kurang terlaksana, karena masih terdapat penggunaan timbangan yang tidak sesuai standar dan yang diperbolehkan sebagai alat takar dalam jual beli barang, dan disini nyaman, keamanan kurang terjamin bagi masyarakat. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar timbangan (metrologi) pedagang.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan diantaranya pengamatan dalam pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka), dan laporan-laporan lisan maupun tulisan.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) untuk Indikator Pengukuran Pelaksanaan kegiatan

Tabel V. 12 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan lisan Maupun Tulisan	31	32	109	172
2	Tanggapan Terhadap Laporan	25	40	107	172
3	Pengamatan Langsung	37	47	88	172
4	Pelaksanaan Pengamatan Langsung	40	35	97	172
Jumlah		133	154	401	688
Rata-Rata		33,25	38,5	100,25	172
Persentase		19%	23%	58%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan indikator dari tabel V. 12 diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) Berdasarkan pada tabel tanggapan responden terhadap indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat rata-rata sebanyak 33,25 serta persentase 19% dengan kategori penilaian “Terlaksana”, kemudian sebanyak 38,5 serta persentase 23% dengan kategori penilaian “Cukup Terlaksana”, dan sebanyak 100,25 serta persentase 58% dengan kategori penilaian “Kurang Terlaksana”.

Untuk indikator penilaian tertinggi adalah “Kurang Terlaksana” dengan persentase 58%, maka dari itu tanggapan dari responden mengenai indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah “kurang Terlaksana” dengan baik. Tetapi tetap harus meningkatkan pelaksanaan Pengamatan langsung Terhadap Timbangan (Metrlogi) Pedagang.

Sementara itu dari hasil wawancara terhadap ibu Hj. Parhatun. S.si (Kepala Seksi Pengawasan Metrologi) mengenai indikator ketiga, yaitu menurut Ibu, Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Pernah Melakukan Pengamatan Langsung Terhadap Timbangan Terkait Standar Timbangan Pedagang? Beliau menjawab

“Untuk Pengamatan secara langsung dari Dinas perindustrian dan Perdagangan sendiri terhadap timbangan yang digunakan pedagang, Kami juga bekerja sama dengan UPT Metrologi Legal untuk melakukan pelaksanaan dan pengamatan terhadap timbangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan kami juga memberikan himbauan kepada pedagang untuk men Tera (mengikuti sidang tera) timbangan nya setahun sekali demi kenyamanan dan keamanan masyarakat maupun pedagang itu sendiri.” (wawancara, hari/tanggal : kamis 15 april 2021).

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan sebagai pihak terkait terhadap pengawasan Timbangan cukup terlaksana, tetapi masih terdapat pedagang menggunakan timbangan yang tidak memenuhi standar, dan disini kenyamanan dan keamanan masyarakat kurang terjamin. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan standar timbangan pedagang.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar

Perbandingan pelaksanaan dengan standar ialah membandingkan pelaksanaan realita dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa agar dapat diketahui penyebab standar yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) untuk indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 13 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar terhadap Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Pengawasan	34	47	91	172
2	Pelaksanaan Pengawasan	37	40	95	172
3	Inspeksi Mendadak	23	35	114	172
4	Pelaksanaan Inspeksi Mendadak	30	41	101	172
Jumlah		124	163	401	688
Rata-Rata		31	40,75	100,25	172
Persentase		18%	24%	58%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan indikator dari tabel V. 13 diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) Berdasarkan pada tabel tanggapan responden terhadap indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat rata-rata sebanyak 31 serta persentase 18% dengan kategori penilaian “Terlaksana”, kemudian sebanyak 40,75 serta persentase 24% dengan kategori penilaian “Cukup Terlaksana”, dan sebanyak 101,25 serta persentase 58% dengan kategori penilaian “Kurang Terlaksana”.

Untuk indikator penilaian tertinggi adalah “Kurang Terlaksana” dengan Persentase 58%, maka dari itu tanggapan dari responden mengenai indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar masih “Kurang Terlaksana” dengan baik. Oleh karena itu, perbandingan pelaksanaan dengan standar perlu adanya perbaikan untuk kenyamanan masyarakat.

Sementara itu dari hasil wawancara terhadap ibu Hj. Parhatun. S.si (Kepala Seksi Pengawasan Metrologi) mengenai indikator keempat, yaitu menurut Ibu, Apakah dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Pernah Melakukan Inspeksi Mendadak terhadap timbangan pedagang yang tidak memenuhi standar timbangan? Beliau menjawab :

“Untuk inspeksi kami ada melakukannya tetapi hanya pada masa tertentu seperti ketika harga sembako naik, sebelum masuk bulan ramadhan karena kami tidak memiliki PPNS Pegawai Penyidik Negeri Sipil, kami juga melakukan pengawasan yang rutin dan terjadwal sesuai dengan surat perintah yang diberikan kepada kami. kami juga memberikan himbauan kepada pedagang agar menggunakan timbangan yang memenuhi standar dan men tera timbangannya setahun sekali sesuai peraturan yang berlaku.” (wawancara, hari/tanggal : kamis 15 april 2021).

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis temukan pada indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar yaitu, pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak terkait terhadap penggunaan timbangan cukup terlaksana, tetapi masih terdapat timbangan yang tidak memenuhi standar dan tidak boleh digunakan menurut undang-undang metrologi nomor 2 tahun 1981. Seharusnya Dinas terkait lebih tegas dalam melakukan penegakan penggunaan timbangan yang memenuhi standar yang diperbolehkan untuk digunakan oleh pedagang untuk bertransaksi jual beli.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Pengambilan tindakan koreksi yaitu apabila hasil perbaikan terhadap timbangan yang tidak sesuai dengan peraturan atau undang-undang menunjukkan bahwa timbangan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, tindakan ini harus diambil agar peraturan atau

undang-undang terlaksana dengan baik dan kenyamanan dan keamanan masyarakat terjamin.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) untuk indikator Pengambilan tindakan koreksi bila perlu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 14 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu terhadap Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Perbaikan Standar	34	43	95	172
2	Pelaksanaan Perbaikan	42	47	83	172
3	Pemberian Sanksi	37	53	82	172
4	Pelaksanaan Sanksi	31	57	84	172
Jumlah		144	200	344	688
Rata-Rata		36	50	86	172
Persentase		21%	29%	50%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan indikator dari tabel V. 14 diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) Berdasarkan pada tabel tanggapan responden terhadap indikator Pengambilan tindakan koreksi bila perlu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat rata-rata sebanyak 36 serta persentase 21% dengan kategori penilaian “Terlaksana”, kemudian sebanyak 50 serta persentase 29% dengan kategori penilaian “Cukup Terlaksana”, dan sebanyak 86 serta persentase 50% dengan kategori penilaian “Kurang Terlaksana”.

Untuk indikator penilaian tertinggi adalah “Kurang Terlaksana” dengan persentase 50%, maka dari itu tanggapan masyarakat mengenai indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu harus adanya perbaikan dan peningkatan untuk kenyamanan dan terlaksananya standar timbangan.

Sementara itu dari hasil wawancara terhadap ibu Hj. Parhatun. S.si (Kepala Seksi Pengawasan Metrologi) mengenai indikator kelima, yaitu menurut Ibu, Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melaksanakan sanksi terhadap pedagang yang menggunakan timbangan yang tidak memenuhi standar? Beliau menjawab :

“Tentu ada sanksi diberikan kepada pedagang yang tidak memenuhi standar timbangan seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Metrologi Nomor 2

tahun 1981 tentang standar timbangan, kami memberikan tindak lanjut kepada pedagang itu berupa teguran, apabila tidak dilakukan perbaikan pada timbangan (Mengikuti sidang tera) maka dicabut hak izin berdagang dipasar. “(wawancara, hari/tanggal : Kamis 15 April 2021).

Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi kasus Pasar Pagi Arengka) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 15 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Perindikator Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka).

NO	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Penetapan standar pelaksanaan	33,8 (19%)	72,2 (42%)	66 (39%)	172
2	Penentuan pelaksanaan kegiatan	28,67 (17%)	42,67 (24%)	100,67 (59%)	172
3	Pengukuran pelaksanaan kegiatan	33,25 (19%)	38,5 (23%)	100,25 (58%)	172
4	Perbandingan pelaksanaan dengan standar	31 (18%)	40,75 (24%)	100,25 (58%)	172
5	Pengambilan tindakan koreksi bila perlu	36 (21%)	50 (29%)	86 (50%)	172
Jumlah		162,72	244,12	453,17	860
Rata-Rata		32,54	48,24	90,6	172
Persentase		19%	28%	53%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021-06-28

Berdasarkan dari tabel V. 15 diatas yang menjalankan hasil rekapitulasi jawaban dari responden, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori “Terlaksana” adalah 32,54 (19%), kemudian rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori “Cukup Terlaksana” adalah 48,24 (28%), dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori “Kurang Terlaksan” adalah 90,6 (53%)

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk hasil penelitian responden dikategorikan “Kurang Terlaksana”, artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

C. Hambatan dalam Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

Dari analisa data yang dilakukan diatas maka dapat penulis tarik beberapa hambatan mengenai Pelaksanaan Pengawasan ukuran, takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) antara lain :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru kurang efektif sehingga masih ada pedagang yang tidak menggunakan timbangan yang tidak memenuhi standar, yang tidak memiliki tanda tera, yang disebabkan kurangnya peran pihak Dinas Perindustrian dalam Menjalankan Tugas, dan Dinas Perindustrian juga tidak memiliki PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil)
2. Kurangnya kesadaran diri dari pedagang untuk menggunakan timbangan yang sesuai dengan peraturan dan men tera (mengukur ulang) di dinas yang berwenang secara rutin.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Pengawasan ukuran, takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka) yang menggunakan indikator penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar, pengambilan tindak koreksi bila perlu, maka dapat penulis ambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan kategori penilaian responden berada pada kategori Cukup Terlaksana yaitu 42 % yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki.
2. Untuk indikator Penentuan Pelaksanaan kegiatan kategori penilaian responden berada pada kategori Kurang Terlaksana yaitu 59% yang berarti belum maksimalnya kinerja Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan
3. Untuk indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan kategori penilaian responden berada pada kategori kurang terlaksana yaitu 58% yang berarti belum maksimalnya Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menetapkan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
4. Untuk indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar kategori penilaian responden berada pada kategori kurang terlaksana yaitu 58% yang berarti belum keseluruhannya dari sub indikator belum berjalan sesuai dengan perbandingan pelaksanaan dengan standar dalam pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan harus melakukan perbaikan

5. Untuk indikator pengambilan tindakan koreksi bila perlu kategori penilaian responden berada pada kategori kurang terlaksana yaitu 50% yang berarti keseluruhannya dari sub indikator belum terlaksana sesuai dengan pengambilan tindakan koreksi yang telah ditetapkan serta harus adanya perbaikan untuk terlaksananya kenyamanan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk lebih memperhatikan Timbangan yang digunakan oleh Pedagang supaya kenyamanan,keamanan masyarakat lebih terjamin.
2. Diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih tegas dalam mengambil tindakan untuk memberikan teguran atau sanksi apabila pedagang yang menggunakan timbangan yang tidak sesuai aturan dan tidak memiliki tanda tera (tidak mengukur secara berkala didinas terkait). Sesuai undang-undang metrologi Nomor 2 Tahun 1981
3. Diharapkan para pedagang agar lebih memperhatikan dan melakukan pen teraan (mengukur timbangan secara berkala didinas terkait) agar tetap sesuai dengan peraturan standar timbangan yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Antolilah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia.
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta.
- Darwis, Dkk, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Effendi, M. M 2015. *Asas-Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham. 2012 . *Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Fahmi, Irham. 2013. *Perilaku Organisasi. Teori, Aplikasi dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Hamim, Sufian. 2005. *Administrasi Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru, Uir Press.
- Hasibuhan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 2017. *Manajemen*, Edisi Kedua, Cetakan DuaPuluh Tujuh Yogyakarta: Penerbit BPEE. Kansi.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Maulidah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*. Bandung: Cv. Indra Prahasta.
- Manullang. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Universitas Gajah Mada
- Manullang, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, Bandung: P.T. Alumni.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindoo.
- Pasalog, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Samsudin, Sadi. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung, CV Pustaka Seda.

- Siagian, Sondang. P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. P. 2006. *Filsafah Administrasi*, Jakarta, Raja Grafindo. Dan Implementasi Bumi Aksara, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik, cetakan kedua*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Bumi Aksara.
- Siswanto, HB. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sule, Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Prenada Media.
- Terry. George. R. 1986. *Asas-Asas Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Toha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Komtemporer*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Yussa, Tarmizi dan Hendry Andry. 2015. *Prilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Zulkifli, 2005, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.

Dokumentasi :

- Buku Pedoman Penulisan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi 2013 diterbitkan Khusus Untuk Kalangan Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
- Peraturan Walikota Pekanbaru No 114 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Sutiah. 2016. Penerapan sistem timbangan dalam jual beli ayam potong dipasar selasa Panam Pekanbaru ditinjau dari aspek ekonomi islam. *Skripsi*. Pekanbaru. Universitas Islam Negri Sultan Syarif kasim.